



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
TIM SINERGI BADAN KEAHLIAN
SETJEN DPR RI

KEGIATAN

Masa Reses II Tahun Sidang 2024-2025 (26 Maret – 16 April 2025)

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

DIKELOLA OLEH:

TIM SINERGI ANTARA BADAN KEAHLIAN, PARA KABAG SET AKD DEPUTI PERSIDANGAN, DAN TENAGA AHLI AKD.

f 30/4/25

DAFTAR ISI

KOMISI I	1
A. FUNGSI LEGISLASI	1
B. FUNGSI ANGGARAN	1
C. FUNGSI PENGAWASAN	1
D. TUGAS KHUSUS	1
KOMISI II	2
A. FUNGSI LEGISLASI	2
B. FUNGSI ANGGARAN	2
C. FUNGSI PENGAWASAN	2
KOMISI III	4
A. FUNGSI LEGISLASI	4
B. FUNGSI ANGGARAN	4
C. FUNGSI PENGAWASAN	4
KOMISI IV	8
A. FUNGSI LEGISLASI	8
B. FUNGSI ANGGARAN	8
C. FUNGSI PENGAWASAN	8

KOMISI V	12
A. FUNGSI LEGISLASI	12
B. FUNGSI ANGGARAN	12
C. FUNGSI PENGAWASAN	12
KOMISI VI	14
A. FUNGSI LEGISLASI	14
B. FUNGSI ANGGARAN	14
C. FUNGSI PENGAWASAN	14
KOMISI VII	18
A. FUNGSI LEGISLASI	18
B. FUNGSI ANGGARAN	18
C. FUNGSI PENGAWASAN	18
KOMISI VIII	20
A. FUNGSI LEGISLASI	20
B. FUNGSI ANGGARAN	20
C. FUNGSI PENGAWASAN	20

KOMISI IX	21
A. FUNGSI LEGISLASI	21
B. FUNGSI ANGGARAN	21
C. FUNGSI PENGAWASAN	21
KOMISI X	22
A. FUNGSI LEGISLASI	22
B. FUNGSI ANGGARAN	22
C. FUNGSI PENGAWASAN	22
KOMISI XI	29
A. FUNGSI LEGISLASI	29
B. FUNGSI ANGGARAN	29
C. FUNGSI PENGAWASAN	29
KOMISI XII	34
A. FUNGSI LEGISLASI	34
B. FUNGSI ANGGARAN	34
C. FUNGSI PENGAWASAN	34
KOMISI XIII	35
A. FUNGSI LEGISLASI	35

B. FUNGSI ANGGARAN	35
C. FUNGSI PENGAWASAN	35
BADAN LEGISLASI	44
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN	46
MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN	51

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI I

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	BIN	Kunker Reses Komisi I DPR RI dengan Kabinda Banten dilaksanakan pada 12 – 16 April 2025.	Tertutup.	
2.	Menhan/Panglima TNI	Kunker Reses Komisi I DPR RI dengan Korem 064/MY dilaksanakan pada 12 – 16 April 2025.	Mencari masukan terhadap permasalahan yang ada di Mitra.	
3.	Menhan/Panglima TNI	Kunker Reses Komisi I DPR RI dengan Kopasgat TNI AU dan Seskoad dilaksanakan pada 12 – 16 April 2025.	Mencari masukan terhadap permasalahan yang ada di Mitra.	
4.	Kemkodigi	Kunker Reses Komisi I DPR RI dengan Balai Uji Perangkat Komdigi dilaksanakan pada 12 – 16 April 2025.	Mencari masukan terhadap permasalahan yang ada di Mitra.	
5.	BSSN	Kunker Reses Komisi I DPR RI dilaksanakan pada 12 – 16 April 2025.	Mencari masukan terhadap permasalahan yang ada di Mitra.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI II

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	a. Pemerintah Daerah b. Kanwil BPN c. KPU d. Bawaslu	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah. Kunjungan Kerja pada Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024 – 2025 ke Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Lebak Provinsi Jawa Barat pada tanggal 26 – 30 Maret 2025.		

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	a. Kementerian Dalam Negeri Negara Italia b. KBRI Roma	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah. Kunjungan Luar Negeri Komisi II DPR RI ke Negara Italia pada tanggal 8 – 14 April 2025.	Terkait Sistem Data Identitas Kependudukan.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI III

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana	Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Koalisi Masyarakat untuk Pembaruan KUHP 8 April 2025.	Masukan terhadap Penyusunan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).	--

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Sdr. Weldi Sumantri	RDPU Komisi III DPR RI pada 27 Maret 2025 dengan agenda menerima aspirasi masyarakat terkait dugaan penyerobotan lahan oleh PT Bumi Pratama Khatulistiwa (anak perusahaan Wilmar Internasional, Ltd)	Komisi III DPR RI telah menerima penjelasan dari Sdr. I Wayan Aditya dan Sdr. Weldi Sumantri terkait duduk perkara perdata dan dugaan penyerobotan lahan di Desa Kuala Mandor B, Kecamatan Kuala Mandor, Kalimantan Barat yang menimpa keluarga Sdr. Weldi Sumantri. Dengan ini Komisi III DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut: 1. Komisi III DPR RI meminta Kabid Propam Polda Kalimantan Barat untuk melakukan evaluasi terkait penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) dengan Laporan Polisi Nomor: L/K/167/IX/2005 tertanggal 15 September 2005 dan dugaan penyalahgunaan kode etik profesi Polri oleh	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>oknum Polda Kalimantan Barat terkait suap oleh PT Bumi Pratama Khatulistiwa untuk penerbitan SP 3.</p> <p>2. Komisi III DPR RI mendukung upaya mediasi antara Sdr. Weldi Sumanti dan PT Bumi Pratama Khatulistiwa anak dari perusahaan Wilmar International Ltd terkait ganti pelepasan hak atas lahan dan kompensasi pemakaian lahan selama 23 tahun dengan akan memanggil PT Bumi Pratama Khatulistiwa ke Komisi III DPR RI.</p>	
2.	<p>1. Polda Sumatera Utara 2. Kejati Sumatera Utara 3. BNNP Sumatera Utara</p>	<p>Kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara pada 26-30 Maret 2025.</p>	<p>1. Komisi III DPR RI menerima penjelasan terkait pencapaian maupun kendala yang dihadapi dan terus mendukung peningkatan kualitas kinerja Polda, Kejaksaan Tinggi, dan BNNP Sumatera Utara yang masih membutuhkan dukungan anggaran maupun dukungan sarana dan prasarana lainnya untuk pemenuhan sumber daya organisasi.</p> <p>2. Komisi III DPR RI meminta para Mitra Kerja Komisi III DPR RI di Provinsi Sumatera Utara untuk mengoptimalkan anggaran yang ada dalam mencapai target kinerja, serta akan menindaklanjuti kendala dan usulan kebutuhan yang telah disampaikan kepada para Mitra Kerja Komisi III DPR RI di pusat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>3. Komisi III DPR RI meminta seluruh Mitra Kerja di Provinsi Sumatera Utara untuk tetap mengedepankan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas kerja, serta peningkatan kualitas dan kecepatan layanan publik pada masing-masing tugas dan fungsi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat.</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>4. Komisi III DPR RI meminta agar kerja sama dalam bentuk koordinasi, kolaborasi, dan berbagai kegiatan bersama dapat terus ditingkatkan baik di dalam maupun luar instansi, baik dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu maupun instansi lainnya untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas kerja yang terarah dan profesional.</p>	
3.	<p>1. Polda Bali 2. Kejati Bali 3. BNNP Bali</p>	<p>Kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI ke Provinsi Bali pada 26-30 Maret 2025.</p>	<p>1. Komisi III DPR RI menerima penjelasan terkait pencapaian maupun kendala yang dihadapi dan terus mendukung peningkatan kualitas kinerja Polda, Kejaksaan Tinggi, dan BNNP Bali yang masih membutuhkan dukungan anggaran maupun dukungan sarana dan prasarana lainnya untuk pemenuhan sumber daya organisasi.</p> <p>2. Komisi III DPR RI meminta seluruh Mitra Kerja di Provinsi Bali untuk tetap mengedepankan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas kerja, serta peningkatan kualitas dan kecepatan layanan publik pada masing-masing tugas dan fungsi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat.</p> <p>3. Komisi III DPR RI meminta agar kerja sama dalam bentuk koordinasi, kolaborasi, dan berbagai kegiatan bersama dapat terus ditingkatkan baik di dalam maupun luar instansi, baik dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu maupun instansi lainnya untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas kerja yang terarah dan profesional.</p>	
4.	<p>1. Polda Kalimantan Tengah 2. Kejati Kalimantan Tengah 3. BNNP Kalimantan Tengah</p>	<p>Kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI ke Provinsi Kalimantan Tengah pada 10-14 April 2025.</p>	<p>1. Komisi III DPR RI akan terus mendukung peningkatan kualitas kinerja Polda, Kejaksaan Tinggi, dan BNNP Kalimantan Tengah yang masih membutuhkan dukungan anggaran</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>maupun dukungan sarana dan prasarana lainnya untuk pemenuhan sumber daya organisasi.</p> <p>2. Komisi III DPR RI meminta seluruh Mitra Kerja di Provinsi Kalimantan Tengah untuk tetap mengedepankan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas kerja, serta peningkatan kualitas dan kecepatan layanan publik pada masing-masing tugas dan fungsi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat.</p> <p>3. Komisi III DPR RI meminta agar kerja sama dalam bentuk koordinasi, kolaborasi, dan berbagai kegiatan bersama dapat terus ditingkatkan baik di dalam maupun luar instansi, baik dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu maupun instansi lainnya untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas kerja yang terarah dan profesional.</p>	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IV

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA/PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	1. Walikota Sabang; 2. Kepala Badan Karantina Indonesia; 3. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, KKP; 4. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap; 5. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Hasil Kelautan dan Perikanan; 6. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kemenhut; 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh; 8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh; 9. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sabang; dan	Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Provinsi Aceh dilaksanakan pada 9-13 April 2025.	1. Meninjau Pelabuhan Perikanan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Gempong Le Meulee Sabang & Tempat Pelelangan Ikan Le Meulee 2. Peninjauan dan Diskusi mengenai Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Kawasan Perlindungan Alam TWA Pulau Weh.	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA/PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	10. Masyarakat Kelautan dan Perikanan/Nelayan			
2.	1. Walikota Medan; 2. Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE), Kemenhut; 3. Dirjen Penegakkan Hukum Kehutanan, Kemenhut; 4. Deputi Bidang Karantina Hewan, Badan Karantina Indonesia dan 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Provinsi Sumatera Utara. 6. Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian 7. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian 8. Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional 9. Direksi Perum Bulog 10. Direksi PT PI 11. Direksi ID FOOD 12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara	Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan pada 9-13 April 2025.	1. Meninjau sarana prasarana BKSDA Sumut dan Diskusi mengenai Penanganan dan Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Liar Dilindungi. 2. Peninjauan dan Diskusi mengenai Progres realisasi penyerapan beras petani dalam rangka mencapai target 3juta ton setara beras. 3. Meninjau sarana prasarana pelabuhan serta berdiskusi mengenai permasalahan perizinan, kebijakan penangkapan ikan, dan lain-lain di Lokasi Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan.	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA/PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	13. Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan 14. Mitra Pengadaan Gabah/Beras Perum Bulog 15. Penyulu dan Gapoktan/Poktan Medan 16. Dirjen Perikanan Tangkap, KKP; 17. Direktur Kepelabuhan Perikanan, KKP; 18. Direktur Perizinan dan Kenelayanan, KKP; 19. Deputi Bidang Karantina Ikan, Badan Karantina Indonesia 20. Dirut Perindo; 21. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera; dan 22. Nelayan dan Organisasi Nelayan			
3.	1. Gubernur Sumsel; 2. Bupati Banyuasin; 3. Kepala Badan Pangan Nasional; 4. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana, Kementan 5. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Kementerian Kehutanan. 6. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian. 7. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk KP, KKP	Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan pada 9-13 April 2025.	1. Meninjau Lokasi OPLA Lahan Rawa dan Pompanisasi di Desa Seri Menanti, Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin. 2. Peninjauan dan Diskusi di Gudang Bulog membahas Ketersediaan dan Harga Pangan di Provinsi Sumsel. 3. Peninjauan dan Diskusi di Balai Karantina Indonesia dalam rangka mendukung ekspor bidang pertanian dan perikanan. 4. Peninjauan dan Diskusi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan serta Penegakkan Hukum nya di	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA/PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	8. Dirjen Penegakkan Hukum Kehutanan, Kementerian Kehutanan. 9. Kepala Badan Pangan Nasional 10. Direksi Perum Bulog; 11. Direksi PT Pupuk Indonesia; 12. Direksi PT Pupuk Sriwidjaja 13. Direksi ID Food 14. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel; 15. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel; 16. Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan. 17. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan		Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera.	
4.	Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI	Rapat Internal Komisi IV dilaksanakan pada hari Rabu, 17 April 2025 Pukul 11.00 WIB.	Menyusun Program Kerja Komisi IV DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI V

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	1. Kementerian Pekerjaan Umum; Ditjen Bina Marga, Ditjen SDA, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Prasarana Strategis, Ditjen Bina Konstruksi, BPJT, BPIW; 2. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; 3. Kementerian Perhubungan; Ditjen Hubdat, Ditjen Hubla, Ditjen Hubud; 4. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; 5. Kementerian Transmigrasi; 6. BMKG;	Kunjungan Kerja Reses, dilaksanakan pada Tanggal, 12 – 16 April 2025.	KUNKER RESES DALAM RANGKA MENINJAU SARPRAS INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI Daerah Kunker : 1. Prov Jambi meninjau Tol Jambi- Rengat dan Tol Jambi- Palembang, Lokasi Banjir Kota Jambi dan Pengendali Banjir Sungai Asam; 2. Prov Kalimantan Tengah meninjau Bandara Tjilik Riwut, Drainase Banjir Kota Palangkaraya, IAHN Tampung Penyang Palangkaraya; 3. Prov Sulawesi Utara meninjau Pembangunan Jalan Manado Bypass (MORR 3 tahap 4), Nufrep Sungai Tondano	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	7. BNPP/Basarnas; 8. PT. Angkasa Pura Indonesia; 9. PT. <i>Injourney Aviation Services (IAS)</i> 10. PT. Hutama Karya 11. ASDP			

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	1. PT Jasa Marga (Persero) 2. PT Hutama Karya (Persero)	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dilaksanakan tanggal 17 Maret 2025.	Kesiapan Dukungan terhadap Arus mudik dan balik Lebaran Idul Fitri Tahun 2025 di Tol Trans-Jawa dan Tol Trans-Sumatera.	
2.	ID FOOD beserta Sub Holdingnya	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dilaksanakan tanggal 18 Maret 2025.	1. Evaluasi kinerja korporasi Tahun 2024. 2. Penyampaian rencana kerja dan <i>roadmap</i> korporasi Tahun 2025. 3. Lain-lain.	
3.	Rapat Kerja dengan Wakil Menteri BUMN ; Rapat Dengar Pendapat dengan: 1. Pjt Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur 2. Asisten Deputi Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media 3. Asisten Deputi Bidang Jasa Keuangan	Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dilaksanakan tanggal 18 Maret 2025.	Tindaklanjut penyelesaian permasalahan Kreditur PT Istaka Karya (Persero) Peninjauan operasional <i>Hyperscale Data Center</i> .	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	4. Asisten Deputi Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun 5. Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik 6. Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk 7. BSI 8. PT PPA 9. PT Brantas Abipraya (Persero) 10. PT Waskita Karya (Persero) Tbk 11. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 12. PT Jaminan Kredit Indonesia 13. PT Asuransi Jasindo, 14. PT Pelindo (Persero) 15. Perum Bulog 16. Tim Kurator PT Istaka Karya (Persero)			
4.	Kementerian BUMN	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dilaksanakan tanggal 19 Maret 2025.	1. Pembahasan Pelaksanaan Inbreng Saham BUMN ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. 2. Lain-lain.	
5.	PT PTPN III dan Subholding PT PTPN I	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dilaksanakan tanggal 19 Maret 2025.	1. Isu alih fungsi lahan di kawasan Puncak, Jawa Barat. 2. Lain-lain.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
6.	1. Kementerian Bumh RI 2. PT Pelni 3. PT ASDP Ferry Indonesia 4. PT Pelindo	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Jawa Timur dilaksanakan tanggal 21 s.d. 23 Maret 2025.	Kesiapan BUMN transportasi laut dalam menghadapi arus mudik dan balik libur Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025.	
7.	1. Kementerian BUMN RI 2. PT KAI 3. Perum Damri	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI Ke Jawa Barat dilaksanakan tanggal 21 s.d. 23 Maret 2025.	Kesiapan BUMN transportasi darat dalam menghadapi arus mudik dan balik libur Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025.	
8.	1. Kementerian BUMN RI 2. DPT Aviawi Pariwisata Indonesia (Persero), 3. PT Garuda Indonesia 4. PT Citilink Indonesia 5. PT Pelita Air Service 6. Airnav	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI Ke Yogyakarta dilaksanakan tanggal 21-23 Maret 2025.	Kesiapan BUMN transportasi udara dalam menghadapi arus mudik dan balik libur Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025.	
9.	ID FOOD beserta Sub Holdingnya	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dilaksanakan tanggal 24 Maret 2025.	1. Evaluasi kinerja korporasi Tahun 2024. 2. Penyampaian rencana kerja dan <i>roadmap</i> korporasi Tahun 2025. 3. Lain-lain.	
10.	1. Kementerian BUMN 2. Len / Defend ID 3. PT Pindad 4. PT Dirgantara Indonesia 5. PT Dahana 6. PT Pal 7. PT Pos 8. PT KCIC	Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI Ke Jawa Barat dilaksanakan tanggal 9 s.d. 13 April 2025.	1. Tema Sesi I : Peninjauan Pengembangan Ekosistem BUMN Industri Pertahanan. 2. Tema Sesi II : Evaluasi Manajemen Logistik dan Peranan Kereta Cepat Jakarta Bandung pada saat Idul Fitri Tahun 2025.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
11.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian BUMN 2. PT Permodalan Nasional Madani 3. PT Pegadaian 4. Kemenkoperasi RI 5. Dinas Koperasi Sulawesi Selatan 6. Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir 	<p>Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI Ke Sulawesi Selatan dilaksanakan tanggal 9 s.d. 13 April 2025.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tema Sesi I: Strategi Menghadapi Fluktuasi Ekonomi Global & Nasional serta Dukungan Terhadap Pelaku Usaha. 2. Tema Sesi II: Pengembangan Sektor Koperasi Menuju Koperasi Modern. 	
12.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian BUMN 2. PTPN III Holding 3. Palm Co (PTPN Group) 4. Sugar Co (PT Sinergi Gula Nusantara / PTPN group) 5. Supporting Co. / PTPN I 6. Perum Perhutani 7. PT Hutama Karya 	<p>Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI Ke Provinsi Jawa Timur dilaksanakan tanggal 9 s.d. 13 April 2025.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tema Sesi I: Pengembangan Sektor Perkebunan dan Kehutanan Oleh Ekosistem BUMN. 2. Tema Sesi II : Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Infrastruktur Transportasi Darat Selama Arus Mudik/Balik Idul Fitri. 	
13.	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Pertamina Internasional Shipping 2. PT. BNI London 3. PT. Mandiri London 4. PT. Indometal London Mind ID 5. KBRI di London 6. Atase Perdagangan London 	<p>Kunjungan kerja luar negeri Pimpinan dan Kapoksi Komisi VI DPR RI Ke London, Negara Inggris Terkait Fungsi Pengawasan dilaksanakan tanggal 14 s.d. 20 April 2025.</p>	<p>Melaksanakan fungsi pengawasan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan untuk mendapatkan masukan terkait hubungan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Inggris.</p>	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	1. Kementerian Pariwisata RI 2. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten 3. Kementerian UMKM RI 4. Kementerian Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI 5. Dirjen Ilmate Kementerian Perindustrian RI 6. Direksi PT Krakatau Steel 7. Pelaku Usaha di Industri Baja 8. Direktur Utama PTPN IV PalmCo (Sumatera Utara) 9. Dirjen IKMA Kementerian Perindustrian 10. Direktur Utama Balai Pengembangan Industri	1. Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Banten pada Tanggal, 26 – 30 Maret 2025; 2. Kunjungan Kerja Reses, ke Provinsi Sumatera Utara pada Tanggal, 10 – 14 April 2025; 3. Kunjungan Kerja Reses, ke Provinsi Jawa Timur pada Tanggal, 12 – 16 April 2025;	Dalam rangka Rakernas Kemberin 2025 (Rapat Kerja Nasional) bertujuan mendapatkan dukungan kedepan dalam bersinergi untuk pengembangan Pariwisata Indonesia sesuai arahan yang seiringan dengan program pemerintah.	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	Persepatuan Indonesia (BPIPI) di Sidoarjo 11. LPP TVRI 12. LPP RRI 13. LKBN Antara			

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VIII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO.	PIHAK	KEGIATAN	AGENDA	KETERANGAN
1.	Agama, Sosial, Penanggulangan Bencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kunjungan kerja Reses dilaksanakan pada tanggal 26 s.d. 30 Maret 2025 dilaksanakan pada hari Rabu, 12 Maret 2025.	<ol style="list-style-type: none">1. Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Sumatera Utara;2. Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;3. Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Jawa Barat.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IX

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024- 2025	Kunjungan dilaksanakan pada hari Sabtu-Rabu, 12-16 April 2025.	Kunjungan Kerja Reses ke: 1. Provinsi Sumatera Utara; 2. Provinsi Sumatera Selatan; 3. Provinsi Bali. Dilaksanakan dalam rangka memantau dan mengawasi berbagai kebijakan dan program yang direncanakan dan dilaksanakan Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi dan Mitra Kerja Komisi IX DPR RI.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI X

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI	Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024—2025 ke Provinsi Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan dilaksanakan pada tanggal 9—13 April 2025.	Rekomendasi Tim Kunker Reses Komisi X DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none">1. Komisi X DPR RI mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan akses pendidikan secara merata dan berkeadilan khususnya pada daerah yang masuk dalam katagori 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).2. Komisi X DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pelaksana Perpres No.19 Tahun 2025 guna mempercepat pencairan dan pendistribusian tunjangan kinerja bagi dosen ASN serta melakukan evaluasi mekanisme penerimaan calon mahasiswa baru.3. Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah untuk dapat memperkuat program pengembangan kepemudaan, serta mendorong penyelesaian dualisme kepengurusan KNPI Sumatera Barat. Selain itu, Komisi X DPR RI juga mendorong percepatan penyediaan pembangunan dan penyediaan	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>infrastruktur fasilitas olahraga guna mendukung pengembangan olahraga di Sumatera Barat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Komisi X DPR RI mendesak agar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan dan operasional museum sebagai sarana edukasi dan pelestarian budaya, serta dukungan anggaran yang memadai. 5. Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan percepatan pembangunan unit perpustakaan daerah di wilayah Sumatera Barat serta memastikan bahwa seluruh perpustakaan daerah yang telah berdiri di setiap kabupaten/kota telah dilengkapi dengan koleksi bacaan yang memadai, relevan dan mudah diakses oleh masyarakat. 6. Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk mengoptimalkan dan menindaklanjuti Nota Kesepakatan dengan BRIN RI dengan memastikan bahwa hasil riset dan inovasi yang telah dihasilkan dapat diimplementasikan secara nyata melalui kebijakan atau program daerah yang strategis. 7. Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk memperkuat komitmen terhadap pendataan statistik melalui integrasi sistem data yang berkelanjutan, optimalisasi penganggaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta perluasan kerja sama lintas sektor. 	
2.			<p>Rekomendasi Tim Kunker Reses Komisi X DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah: 	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Mendorong kepada Pemerintah, serta Pemprov. Kalimantan Selatan untuk memperhatikan dan menyelesaikan permasalahan terkait rendahnya angka partisipasi sekolah, pemenuhan rasio guru dan siswa yang ideal dan peningkatan kualitas kompetensi pendidik, serta perbaikan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Komisi X DPR RI juga mendesak kepada Pemerintah dan Pemprov. Kalimantan Selatan untuk memenuhi usulan dari SMAN 3 Banjarbaru yaitu penyediaan air bersih siap minum, penyediaan mobil dinas sekolah, serta perluasan mushola.</p> <p>2. Bidang Kebudayaan: Mendorong Pemerintah dan Pemprov. Kalimantan Selatan untuk melibatkan pemuda daerah dalam bidang pendidikan-kebudayaan, memanfaatkan dana abadi kebudayaan, dan mewujudkan terbentuknya Dinas Kebudayaan yang mandiri (berdiri sendiri) di Provinsi Kalimantan Selatan.</p> <p>3. Bidang Pendidikan Tinggi: Mendesak Pemerintah dan Pemprov. Kalimantan Selatan untuk memperhatikan permasalahan umum, yaitu (1) peningkatan akses pendidikan tinggi bagi anak usia kuliah melalui peningkatan KIP-Kuliah maupun beasiswa afirmasi; (2) menyeimbangkan rasio dosen dan mahasiswa dengan menambah dosen PNS DPK di LLDIKTI XI; dan (3) memberikan kebijakan afirmatif melalui regulasi, anggaran dan kebijakan untuk PTN/PTS di Kalimantan, agar dapat memperkecil kesenjangan dengan perguruan tinggi di Pulau Jawa.</p> <p>4. Bidang Pemuda dan Olahraga: Mendorong Pemerintah dan Pemprov. Kalsel untuk meningkatkan dan mengoptimalkan sarana-prasarana</p>	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>kepemudaan dan keolahragaan, serta melibatkan pemuda dalam kegiatan yang kewirausahaan oleh para pemuda.</p> <p>5. Bidang Perpustakaan: Mendorong Pemerintah dan Pemprov Kalsel untuk lebih memberikan perhatian terhadap permasalahan literasi, melalui kerja sama dalam pengembangan perpustakaan sekolah, Perpustakaan perguruan tinggi, dengan perpustakaan masyarakat maupun taman bacaan masyarakat.</p> <p>6. Bidang Riset dan Inovasi Mendorong Pemerintah dan Pemprov. Kalsel untuk memperkuat riset/penelitian yang terkait langsung dengan permasalahan di Kalsel, seperti isu lingkungan akibat pertambangan maupun pengembangan potensi sumber daya alam, guna menghasilkan kebijakan yang berbasis riset dan berdampak langsung bagi masyarakat.</p> <p>7. Bidang Data dan Statistik Mendorong Pemerintah untuk memenuhi usulan BPS Kalsel terkait perlunya kebijakan afirmatif, terutama dalam hal fasilitas teknologi pendukung, jaminan asuransi dan keamanan pada petugas sensus, ada anggaran untuk souvenir bagi responden pemberi data, maupun usulan untuk menaikkan tunjangan kinerja petugas sensus.</p>	
3.			<p>Rekomendasi Tim Kunker Reses Komisi X DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut.</p> <p>1. Kemendikdasmen RI dan K/L terkait mempercepat implementasi regulasi Wajib Belajar 13 Tahun dengan menetapkan langkah operasional yang jelas, terutama untuk memperluas akses PAUD di daerah terpencil. Selain itu, membuka formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian</p>	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Kerja (PPPK) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi guru PAUD swasta menjadi prioritas.</p> <p>2. Kemendikdasmen RI mempertimbangkan pengembalian pengelolaan guru ke pusat (resentralisasi) agar dapat meningkatkan efektivitas manajemen dan standardisasi kualitas pengajaran. Selain itu, perlu meninjau ulang Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah agar syarat pengangkatan kepala sekolah lebih fleksibel dan sederhana.</p> <p>3. Kemendikdasmen RI memperkuat peran unit layanan disabilitas (ULD) dengan menyediakan pelatihan intensif bagi tenaga pendamping dan guru pembimbing khusus (GPK) yang berlatar pendidikan luar biasa (PLB). Selain itu, harus meningkatkan fasilitas di sekolah umum dan sekolah luar biasa (SLB) untuk memenuhi kebutuhan pendidikan inklusif, sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.</p> <p>4. Kemendikdasmen RI mengkaji dan merumuskan regulasi yang memungkinkan integrasi anak berkebutuhan khusus ke dalam sistem pendidikan umum setelah menyelesaikan pendidikan di SLB. Ini termasuk memberikan akses yang sama kepada mereka untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.</p> <p>5. Kemendikdasmen RI menyiapkan dan meningkatkan alokasi anggaran untuk membangun, merenovasi dan merehabilitasi fasilitas pendidikan inklusif, seperti ruang kelas aksesibel, alat bantu belajar, dan sarana pendukung di sekolah luar biasa</p>	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>dan sekolah umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Implementasi Pendidikan Inklusif yang mengharuskan penyediaan fasilitas memadai bagi anak disabilitas</p> <p>6. Kemdiktisaintek RI melakukan terobosan untuk peningkatan “status” akreditasi program studi perguruan tinggi melalui penguatan sistem penjaminan mutu internal, peningkatan kompetensi dosen, serta pembangunan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, didukung dengan digitalisasi proses akreditasi untuk memudahkan pengumpulan data dan pengajuan guna meningkatkan jumlah program studi berakreditasi unggul secara merata.</p> <p>7. Kemdiktisaintek RI mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk meningkatkan sarana dan prasarana di Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Hal ini termasuk memberikan bantuan untuk pembangunan gedung permanen dan fasilitas pendukung lainnya agar PTS tidak lagi bergantung pada penyewaan gedung.</p> <p>8. Kemdiktisaintek RI menambah kuota dan cakupan Program KIP Kuliah untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu, dan memastikan bahwa program ini dapat lebih mudah dijangku mahasiswa.</p> <p>9. Kemdiktisaintek RI meninjau dan merumuskan kembali persyaratan pembukaan program studi agar lebih fleksibel dan tidak memberatkan PTS. Hal ini untuk mendorong inovasi dalam penyediaan program studi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan kebutuhan masyarakat akan pendidikan tinggi.</p> <p>10. Kemenbud RI melibatkan pelaku seni, pemerhati budaya, akademisi, dan masyarakat sipil dalam merumuskan strategi</p>	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>pemajuan kebudayaan yang komprehensif. Selain itu, Kemenbud RI meningkatkan dukungan anggaran untuk pemajuan kebudayaan daerah berdasarkan potensi kebudayaan dan Indeks Pembangunan Kebudayaan, serta memfasilitasi pelatihan bagi tenaga ahli di bidang kebudayaan.</p> <p>11. BPS, Kemendikdasmen RI, dan Kemendagri RI memperkuat dan mengintegrasikan data ke dalam sistem Satu Data Indonesia (SDI) untuk memastikan konsistensi dan kesesuaian data pendidikan antara Dapodik dan Dukcapil. Penguatan kolaborasi data antar pemangku kepentingan melalui Satu Data Indonesia akan meningkatkan akurasi data dan mendukung kebijakan yang tepat, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.</p> <p>12. Mendorong Panja RUU Sisdiknas untuk mempertimbangkan masukan dari pemangku pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan agar RUU tentang Sisdiknas mengatur penguatan sistem penjaminan mutu pendidikan, penguatan peran lembaga yang bertanggung jawab, dan kejelasan definisi anak berkebutuhan khusus (ABK). Selain itu, pengaturan terhadap penyediaan sarana-prasarana dan guru pendidikan khusus di sekolah umum juga sangat diperlukan untuk dipertegas di dalam RUU tentang Sisdiknas.</p>	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI XI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kunjungan Kerja Reses	Kunjungan Kerja Reses Komisi XI Masa Sidang II Tahun Sidang 2024 - 2025 ke Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 11 - 15 April 2025.	<p>Komisi XI DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 ke Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Pasuruan) pada tanggal 11 April s.d 15 April 2025. Kunker Reses dipimpin oleh Dr. H. Mukhamad Misbakhun, S.E., M.H., Ketua Komisi XI DPR RI, dan diikuti oleh beberapa anggota Komisi XI DPR RI dari berbagai fraksi.</p> <p>Kunker Reses Komisi XI DPR RI dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan Komisi XI DPR RI terhadap mitra kerja Komisi XI DPR RI di Provinsi Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, Tim Kunker Reses Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan ke pabrik PT. Gudang Garam, Tbk di Kecamatan Gempol, Pasuruan. Kunjungan ini juga dihadiri Dirjen Bea Cukai, Askolani didampingi Iyan Rubiyanto Direktur Cukai. PT. Gudang Garam diwakili oleh Hamdhany Halim, selaku Direksi dan Freedy dari Divisi Keuangan.</p> <p>Dirjen Bea Cukai Askolani melaporkan bahwa penindakan rokok ilegal terus dilakukan secara intensif. Penindakan dilakukan di jalan maupun kapal ferry. Modus terbaru bahkan menggunakan mobil pribadi. Karena itu</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Dirjen Bea Cukai memandang perlu penguatan intelijen Bea Cukai untuk memantau modus yang semakin beragam.</p> <p>Pada kesempatan tersebut manajemen PT. Gudang Garam, Tbk menyampaikan bahwa akibat kenaikan tarif cukai, dari tahun 2022 hingga tahun 2024 pesanan pita cukai (CK-1) dan pembayaran cukai PT. Gudang Garam, Tbk terus mengalami penurunan. Pesanan pita cukai pada tahun 2022 mencapai 81.225 juta batang, tahun 2023 turun menjadi 57.010 juta batang dan tahun 2024 turun lagi menjadi 50.349 juta batang. Demikian juga dengan pembayaran cukai yang pada tahun 2022 sebesar 74.379 miliar rupiah, tahun 2023 turun menjadi 59.424 miliar rupiah dan pada tahun 2024 turun lagi menjadi 56, 543 miliar rupiah.</p> <p>Manajemen PT. Gudang Garam, Tbk juga menyampaikan apresiasi kepada Dirjen Bea Cukai atas penindakan rokok ilegal dan ketersediaan pita cukai yang semakin baik.</p> <p>Komisi XI DPR RI melalui anggotanya Andreas Eddy Susetyo (Fraksi PDI Perjuangan), meminta klarifikasi dari Dirjen Bea Cukai tentang bagaimana memantau produksi rokok yang dihasilkan berbagai pabrik rokok. Sementara Wihadi Wijanto (Fraksi Partai Gerindra) mengingatkan agar dalam situasi bisnis yang serba tak menentu, pengusaha tidak perlu berkeluh kesah. Pengusaha perlu mencari solusi bersama DPR dan pemerintah, terutama apabila terdapat regulasi yang diperlukan untuk mendukung iklim dunia usaha menjadi lebih kondusif. Mukhamad Misbakhun, selaku Ketua Tim Kunker Reses menekankan bahwa PT. Gudang Garam, Tbk adalah pabrik rokok besar satu-satunya di Indonesia yang masih berstatus perusahaan terbuka dan masih dimiliki oleh pengusaha nasional.</p>	
2.		Kunjungan Kerja Reses Komisi XI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 ke Kota	Komisi XI DPR RI mengadakan Kunjungan kerja Pada Masa Reses (Kunres) Pada Masa Sidang II Tahun 2024-2025, tanggal 12-16 April 2025 ke Kantor Bea Cukai Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk mendapatkan gambaran efektivitas kinerja Bea Cukai di Provinsi Jawa Barat. Kunjungan	Tertutup.

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Bandung Provinsi Jawa Barat Tanggal 12-16 Maret 2025.	<p>Kerja ini dipimpin oleh Bapak Mohamad Hekal, MBA., sebagai Ketua Tim Kunres dan dihadiri oleh beberapa anggota Komisi XI DPR RI, dalam Kunjungan Kerja pada Masa Reses tersebut dihadiri oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Bapak Dwi Teguh Wibowo, Direktur Teknis Pabean Bapak Susila Brata, Direktur Keberatan Banding dan Peraturan Bapak Priyono Triatmojo, Kepala Kanwil Bea dan Cukai Jawa Barat Ibu Finari Manan, Kasubdit Peraturan Bapak Dwiyono Widodo, Kepala KPPBC Bandung Bapak Budi Santoso dan Pejabat setingkat eselon III pada Kanwil Bea dan Cukai Jawa Barat beserta jajaran.</p> <p>kebijakan penghapusan pertimbangan teknis impor oleh Presiden Prabowo diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih baik, meningkatkan daya saing produk lokal, serta merespons kebutuhan pasar dengan lebih cepat dan efisien. Disisi lain pencabutan pertimbangan teknis impor tersebut dapat menyebabkan beberapa dampak negatif, seperti banjir produk impor yang dapat mengancam industri lokal, menciptakan ketidakpastian dalam iklim investasi, menumbuhkan persaingan yang tidak sehat di pasar domestik dan menurunkan standar kualitas produk yang beredar di pasar, karena tidak ada regulasi yang mengawasi kualitas barang impor yang masuk.</p> <p>Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga arus ekspor dan impor di Indonesia. Dimulai dari Pengawasan dan Penegakan Hukum terkait dengan kegiatan ekspor dan impor; Pungutan Pajak dan Bea Masuk sebagai pendapatan bagi negara; Pengendalian Barang Berbahaya; dan melakukan analisis risiko untuk mengawasi arus barang yang berpotensi mengganggu perdagangan yang legal. Dengan peran-peran tersebut, Bea Cukai berkontribusi secara signifikan dalam menjaga kelancaran arus ekspor dan impor, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui perdagangan internasional yang aman dan teratur.</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.		Kunjungan Kerja Reses Komisi XI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 ke Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 21-25 Maret 2025.	<p>Pada hari Senin, 14 April 2025 pada pukul 10.00 WIB, Tim Komisi XI DPR RI yang dipimpin oleh Bapak Dr. M. Hanif Dhakiri M.Si bersama Anggota Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI bersama dengan Bank Indonesia yang diwakili oleh Ibu Destry Damayanti selaku Deputy Gubernur Senior dan LPS yang diwakili oleh Didik Madiyono selaku Anggota Dewan Komisioner. Bertempat di Kantor Perwakilan BI Jawa Tengah Ketua Tim Komisi XI DPR RI Bapak Dr. M. Hanif Dhakiri menyampaikan bahwa tujuan kunker Reses kali ini adalah untuk memperoleh informasi dan penjelasan mendalam mengenai Strategi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi regional, termasuk penerapan kebijakan makroprudensial, menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian inflasi serta upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan khususnya di Provinsi Jawa Tengah dan Kinerja LPS dalam penjaminan simpanan, pelaksanaan program resolusi perbankan, serta efektivitas penyelesaian klaim nasabah di Jawa Tengah.</p> <p>Sementara itu, Ibu Destry Damayanti selaku Deputy Gubernur Senior BI menyampaikan bahwa BI menyambut baik kunjungan reses Komisi XI DPR RI hari ini dan akan terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi regional di Jawa Tengah agar dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Jawa Tengah.</p> <p>Didik Madiyono selaku Anggota Dewan Komisioner LPS akan terus mengoptimalkan kinerja LPS utamanya dalam pelaksanaan kebijakan penjaminan, resolusi bank, dan percepatan pembayaran klaim terhadap nasabah.</p> <p>Di akhir diskusi, Bapak Dr. M. Hanif Dhakiri mengajak seluruh mitra kerja komisi XI untuk bersama-sama bersinergi memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat fondasi ekonomi kita dengan dimulai dari daerah. Karena dari ketahanan ekonomi daerah-lah, kita bisa membangun kekuatan</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>ekonomi nasional yang prospektif dan stabil menghadapi ketidakpastian ekonomi global.</p> <p>Pada hari kedua tepatnya Selasa, 16 April 2025, Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI bersama Direktorat Jenderal Bea Cuka Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Bapak Askolani melanjutkan kegiatannya dengan melakukan kunjungan lapangan ke Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) Kudus dengan tujuan meninjau tempat pengumpulan atau pemusatan pabrik dalam suatu tempat, lokasi, atau kawasan tertentu. Tujuannya adalah untuk memastikan penggunaan DBHCHT di Kudus dikesanakan secara optimal, dan pengawasan kinerja Ditjen Bea Cukai Kemenkeu selaku mitra Komisi XI DPR RI dalam meningkatkan asistensi, pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pengusaha pabrik dengan skala industri kecil dan industri menengah atau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kudus.</p> <p>Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh Bupati Kudus, Pelaku Industri Hasil Tembakau Kudus. Ketua Tim Komisi XI DPR RI Bapak Dr. M. Hanif Dhakiri di sela-sela kunjungan kerja menyatakan bahwa output dari kegiatan ini adalah menghimpun berbagai aspirasi, kendala, dan peluang yang dihadapi sektor ini secara langsung dari para pelaku lapangan. Dengan begitu, rekomendasi kebijakan yang akan kami rumuskan nantinya bukan sekadar normatif, tapi benar-benar grounded, kontekstual, dan berdampak nyata bagi keberlanjutan sektor hasil tembakau khususnya dalam mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat.</p>	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI XII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Koalisi Masyarakat Peduli Tambang (KMPT) Sumbawa Barat	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah. Audiensi dilaksanakan pada tanggal 09 April 2025, pukul 11.00 WIB.	Penyampaian aspirasi mengenai persoalan yang terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat terkait keberadaan tambang tembaga dan emas PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).	
2.	Kunjungan Kerja Reses	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah. Dilaksanakan pada tanggal 12 April 2025 s.d. 16 April 2025.	1. Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Sumatera Utara; 2. Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Sumatera Barat; 3. Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Jawa Timur.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI XIII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<ol style="list-style-type: none">Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan PemasarakatanKantor Wilayah Kementerian HukumKantor Wilayah Kementerian KomnashamKantor Wilayah Kementerian HAM	Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII ke Padang, Sumatera Barat dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 13 April 2025.	<ol style="list-style-type: none">Komisi XIII DPR RI mendukung penguatan kelembagaan Komnas HAM RI dan merekomendasikan Komnas HAM untuk mendorong adanya legislasi daerah yang berperspektif HAM.Komisi XIII DPR RI mendukung Kanwil Ditjen Pemasarakatan Sumatera Barat dalam hal perbaikan sarana prasarana berupa instalasi listrik di Lembaga Pemasarakatan Sumatera Barat untuk memprioritaskan gedung lapas yang merupakan peninggalan kolonial agar mendapat perhatian untuk direlokasi, serta mendorong komunikasi dengan pemerintah daerah terkait pengadaan hibah tanah dan bangunan gedung lapas di wilayah Provinsi Sumatera Barat.Komisi XIII DPR RI merekomendasikan untuk pembentukan Kantor Imigrasi di beberapa titik krusial di Sumatera Barat agar dapat mengatasi permasalahan terbatasnya pelayanan keimigrasian di wilayah Provinsi Sumatera Barat, serta mendorong komunikasi dengan pemerintah daerah terkait	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>pengadaan hibah tanah dan bangunan gedung kantor imigrasi di wilayah Provinsi Sumatera Barat dalam peningkatan pelayanan masyarakat dan pengawasan orang asing.</p> <p>4. Komisi XIII DPR RI meminta jawaban tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, Kepala Kantor Wilayah Pemasarakatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM dan Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat terkait dengan apa yang sudah disampaikan anggota Komisi XIII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Kunjungan Reses paling lambat 7 hari kerja.</p>	
2.	<p>1. Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan</p> <p>2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum</p>	<p>Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII ke Manado, Sulawesi Utara dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 13 April 2025.</p>	<p>A. Kesimpulan RDP dengan Kanwil Ditjen Imigrasi dan Kanwil Ditjen Pemasarakatan Provinsi Sulawesi Utara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XIII DPR RI mengapresiasi upaya Kanwil Ditjen Imigrasi dan Kanwil Ditjen Pemasarakatan Provinsi Sulawesi Utara dalam mengoptimalkan layanan keimigrasian dan pemasarakatan dalam kondisi kebijakan efisiensi di masa transisi di Kementerian Imipias. 2. Komisi XIII DPR RI mendorong segera diselesaikan remunerasi untuk pembayaran pegawai yang berhak berdasarkan data yang bersumber dari Kanwil Hukum dan HAM. 3. Komisi XIII DPR RI akan mengagendakan Rapat Kerja dengan Kementerian Hukum, Kementerian Imipias dan Kementerian HAM untuk membahas keberadaan asset, 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>SDM, dan sarana dan prasarana pasca transisi Kementerian.</p> <p>4. Komisi XIII DPR RI mendukung program <i>Visa On Arrival (VoA)</i> yang telah diterapkan di TPI Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado, dengan tetap mengedepankan kewaspadaan agar terhindar dari potensi penyalahgunaan dan merekomendasikan modernisasi peralatan pemeriksaan keimigrasian dengan penggunaan pintu otomatis (<i>autogate</i>) yang berpotensi meningkatkan PNBP.</p> <p>5. Komisi XIII DPR RI meminta Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara meningkatkan kapasitas petugas dan melakukan penguatan sistem pemeriksaan keimigrasian yang berbasis digitalisasi di seluruh TPI, dalam rangka meningkatkan layanan dan efektivitas sistem keimigrasian.</p> <p>6. Komisi XIII DPR RI mendukung upaya Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara menaikkan status Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado menjadi Kantor Imigrasi kelas I Khusus TPI Manado karena perannya semakin penting dalam menangani arus kedatangan internasional, baik untuk wisatawan, tenaga kerja asing, maupun kepentingan perdagangan antarnegara.</p> <p>7. Komisi XIII DPR RI mengapresiasi upaya Kanwil Ditjen Pemasarakatan Sulawesi Utara dalam meningkatkan fungsi Lembaga Pemasarakatan, pengawasan, dan peningkatan SDM petugas lapas/rutan serta perbaikan</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>tata Kelola di Lembaga pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi informasi.</p> <p>8. Komisi XIII DPR RI menyoroti perlunya peningkatan akses layanan Kesehatan di lapas-lapas/rutan yang ada di Sulawesi Utara, mengingat pentingnya deteksi dini pencegahan penyakit dan layanan Kesehatan tahap awal yang responsif terhadap warga binaan.</p> <p>9. Komisi XIII DPR RI mendorong Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Utara untuk terus berinovasi dalam upaya mengatasi laju melebihi kapasitas hunian di lapas-lapas/rutan dengan melahirkan berbagai terobosan yang lebih komprehensif.</p> <p>B. Kesimpulan RDP dengan Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Utara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XIII DPR RI mengapresiasi kinerja yang telah dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Utara dengan tetap mengoptimalkan peningkatan kinerja ditengah masa transisi dan efisiensi anggaran. 2. Komisi XIII DPR RI meminta untuk menjaga keharmonisan antar Kementerian Hukum, Kementerian Imipas, dan Kementerian HAM khususnya terkait asset, SDM, dan sarana prasarana serta SOTK Kementerian pascatransisi Kementerian. 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ol style="list-style-type: none"> 3. Komisi XIII DPR RI mendorong Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Utara untuk meningkatkan jumlah SDM yang memiliki kompetensi sebagai Perancang Undang-Undang, untuk menganalisis dan memmgevaluasi hukum terhadap permohonan harmonisasi Produk Hukum Daerah yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD baik Tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang terus meningkat setiap tahunnya. 4. Karena keterbatasan SDM penyuluh hukum, Komisi XIII DPR RI meminta Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Utara untuk terus berinovasi dan melahirkan terobosan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan pembuatan konten-konten informatif melalui media sosial untuk meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat dan upaya peningkatan anggaran. 5. Komisi XIII DPR RI mendukung usulan Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Utara untuk pembentukan UPT kantor regional pelayanan hukum di kabupaten/kota agar semakin optimal pelayanan hukum bagi Masyarakat Sulawesi Utara. 6. Komisi XIII DPR RI menyoroti masih rendahnya pemahaman Masyarakat terkait kekayaan intelektual, hal ini tentunya berpengaruh terhadap jumlah pendaftaran/pencatatan kekayaan intelektual di Sulawesi 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Utara, untuk itu Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Utara harus memasifkan lagi sosialisasi untuk menjangkau pelaku UMKM, inventor, pelaku seni dan pelaku usaha lainnya.</p> <p>7. Komisi XIII DPR RI mendorong Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Utara meningkatkan efektivitas dan kemudahan layanan Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual, baik hak cipta, merk, paten, dan desain industri agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat dan pemangku kepentingan di Provinsi Sulawesi Utara.</p> <p>8. Komisi XIII DPR RI meminta Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Utara melakukan edukasi dan sosialisasi rutin, terhadap eksistensi kekayaan intelektual yang sudah lebih dulu ada kepada masyarakat. Sebagai upaya mencegah plagiasi ataupun persamaan pada suatu ciptaan maupun produk.</p> <p>9. Komisi XIII DPR RI meminta Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Utara untuk melakukan pembinaan terhadap Lembaga bantuan hukum dan masyarakat untuk memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum khususnya masyarakat yang tidak mampu.</p>	
3.	Kanwil Kementerian Hukum Aceh, Kanwil Kementerian HAM Aceh, Kanwil	Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII ke Aceh	1. Komisi XIII DPR RI mengapresiasi kerja-kerja yang telah dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum, Kanwil Kementerian HAM, Kanwil Ditjen Imigrasi, Kanwil Ditjen	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	Kementerian Imigrasi Aceh, Kanwil Kementerian Pemasyarakatan Aceh, dan Komnas HAM Perwakilan Aceh		<p>Pemasyarakatan serta Sekretariat Komnas HAM Aceh selama ini di Provinsi Aceh.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Komisi XIII DPR RI mendukung kerja Kantor Wilayah Hukum Aceh terutama dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendapatkan akses bantuan hukum dan upaya mempermudah harmonisasi bagi pemerintan daerah dalam membuat rancangan qanun sehingga tidak lagi terjadi duplikasi. 3. Komisi XIII DPR RI mendorong Kanwil Ditjen Pemasyarakatan melakukan kordinasi dengan Pemerintah daerah terkait dukungan biaya pemindahan Wargabinaan untuk mengatasi kelebihan penghuni Lapas dengan cara melakukan mutasi Warga binaan dari Lapas yang mengalami <i>over capacity</i> ke Lapas yang lebih longgar jumlah Wargabinaannya juga upaya untuk mendapatkan hibah kendaraan operasional bagi Lapas yang tidak memiliki sarana transportasi. Komisi XIII DPR RI akan merekomendasikan kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk segera menerbitkan payung hukum penyediaan Bilik Keluarga guna memenuhi kebutuhan batin wargabinaan. 4. Komisi XIII DPR RI mendukung peningkatan status kantor Imigrasi maupun Unit Kerja Keimigrasian yang ada di Provinsi Aceh untuk dipertahankan serta ditingkatkan menjadi kantor Imigrasi sesuai dengan kebutuhan dimasing-masing daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>keimigrasian kepada masyarakat. serta mendorong Kanwil Direktorat Imigrasi Provinsi Aceh untuk melakukan kordinasi dengan Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk mengatasi masalah relokasi penampungan pengungsi yang saat ini masih menggunakan lahan kantor lama sangat dibutuhkan oleh Kantor Imigrasi Lhokseumawe.</p> <p>5. Komisi XIII DPR RI mendukung Kanwil HAM Provinsi Aceh untuk melakukan perlindungan serta pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah Provinsi Aceh terutama yang berkaitan dengan hak masyarakat akibat banyaknya pengungsi yang memasuki wilayah Provinsi Aceh.</p> <p>6. Komisi XIII mendukung percepatan penyediaan Sarana dan Prasarana Kanwil Hukum, Kanwil HAM, Kanwil Ditjen Imigrasi dan Kanwil Ditjen Pemasarakatan di Provinsi Aceh Provinsi Aceh untuk dapat melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah terkait pengadaan hibah tanah dan bangunan gedung kantor di wilayah Provinsi Aceh dalam melakukan tugas dan fungsi yang diamanahkan oleh Undang-Undang.</p> <p>7. Komisi XIII DPR RI merekomendasikan agar Komnas HAM RI dan Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Aceh untuk segera melakukan kordinasi lebih intensif dengan Kejaksaan Agung RI dalam menyelesaikan 4 (empat) kasus pelanggaran HAM yang sampai saat ini belum tuntas penanganannya.</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			8. Komisi XIII DPR RI meminta jawaban tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM dan Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh terkait dengan apa yang sudah disampaikan anggota Komisi XIII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Kunjungan Reses paling lambat 7 hari kerja.	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.		Rapat Koordinasi dilaksanakan pada Selasa, 15 April 2025 pukul 10.00 WIB.	<p>Sekretariat Badan Legislasi melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Kepala Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Anggota Tim SILEG (Laksmi Harundani, S.H., M.Kn.) dalam rangka Evaluasi Aplikasi SILEG.</p> <p>Kesimpulan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tampilan hasil SILEG pada website DPR akan dibuat list sebagaimana tampilan pada website DPR sebelum perubahan;- Hal teknis <i>penginputan</i> data RUU akan disesuaikan dengan urutan tanggal kegiatan;- Tab Pembuatan Undang-Undang akan dibuatkan Infografis;- Urutan rekam jejak akan disesuaikan agar sesuai urutan dari Penyusunan sampai Selesai, karena saat ini urutannya masih tidak beraturan.	
2.		Rapat Koordinasi dilaksanakan pada Rabu, 16 April 2025 pukul 10.00 WIB.	<p>Sekretariat Badan Legislasi melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Tenaga Ahli Badan Legislasi dan stakeholder terkait dalam rangka Persiapan dan koordinasi teknis kegiatan pelaksanaan penyusunan RUU pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025.</p> <p>Kesimpulan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Teknis penyusunan terhadap RUU tentang Statistik akan diserahkan pada Panja sebagaimana yang telah disusun dalam Jadwal Acara pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024—2025;	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> - BPS mengusulkan agar nama kelembagaan di dalam RUU tetap Badan Pusat Statistik (BPS); - Adanya kewenangan akuisisi data BPS yang diperkuat; - RDPU terkait RUU tentang Statistik menambahkan narasumber dari Operator Seluler dan <i>E-Commerce</i>; - Nomenklatur Dewan Statistik Nasional (DSN) di kembalikan ke konsep lama menjadi Forum Masyarakat Statistik; - Untuk jadwal kegiatan Badan Legislasi berupa RDPU terkait RUU tentang PPMI secara <i>hybrid</i> ditambahkan perwakilan Asosiasi Pekerja Migran dari Negara Malaysia; - Dalam rangka persiapan kegiatan pembahasan RUU tentang Perkoperasian dijadwalkan RDP dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan. 	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	KSB - BKSAP	<i>Virtual Meeting</i> GKSB DPR RI – Parlemen Mongolia dengan <i>Friendship Group</i> Indonesia - Mongolia dilaksanakan pada 26 Maret 2025.	<p>Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Mongolia, Muhammad Hilman Mufidi (A-41/F-FPKB) bersama Anggota GKSB Putih Sari (A-100/F-Gerindra) Anggota GKSB Mongolia dan Drs.Rapidin Simbolon, M.M (A-158/F-PDIP), menggelar pertemuan secara daring (virtual meeting) dengan Ketua Grup Persahabatan Parlemen Mongolia-Indonesia, Hon. Mr. Soronzonbold Lkhagvasuren dan Anggota Parlemen Mongolia Hon. Mr. Tuvshin Banzragch, serta Duta Besar Mongolia untuk Indonesia H.E. Mr. Enkhthaivan Dashnyam, pada siang ini (26/03/2025).</p> <p>Pada Pertemuan ini, Ketua Grup Persahabatan Parlemen Mongolia mengapresiasi hubungan kerja sama yang selama ini telah terjalin antara Mongolia dan Indonesia serta mengucapkan selamat kepada anggota parlemen yang telah terpilih. Anggota Grup Persahabatan Parlemen Mongolia juga menambahkan bahwa harapannya hubungan Mongolia-Indonesia dapat ditingkatkan diberbagai sektor selain dari kerja sama yang sudah terjalin selama ini.</p> <p>Sejumlah poin penting yang menjadi pokok pembahasan dalam pertemuan ini adalah : peningkatan kerja sama ekonomi diberbagai sektor khususnya ekonomi (diversifikasi ekonomi), peningkatan kerja sama diplomasi antara kedua negara dengan berbagi praktik-praktik diantaranya dalam pembangunan demokrasi, pembangunan sosial-ekonomi maupun tata kelola digital, kerja sama pada bidang pariwisata, maupun penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk memperdalam kerja sama antara kedua negara.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Kedua belah pihak menyatakan kesediaannya untuk terus dapat saling bekerja sama diberbagai bidang dan akan meningkatkan komunikasi yang lebih intens.</p>	
2.	KSI - BKSAP	<p>150th IPU <i>Assembly and its Related Meetings</i>, Tashkent, Uzbekistan dilaksanakan pada 5-9 April 2025.</p>	<p>Delegasi BKSAP DPR RI yang dipimpin oleh Ketua BKSAP, Dr. H. Mardani Ali Sera (F-PKS) menghadiri Sidang Umum IPU ke-150 di Tashkent, Uzbekistan 5-9 April 2025. Delegasi BKSAP DPR RI terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Irine Yusiana Roba Putri (F-PDIP) / Wakil Ketua BKSAP 2. Ravindra Airlangga (F-PG) / Wakil Ketua BKSAP 3. M. Husein Fadlulloh (F-PGerindra) / Wakil Ketua BKSAP 4. Bramantyo Suwondo (F-PD) / Wakil Ketua BKSAP 5. Diah Pikatan OP (F-PDIP) / Anggota BKSAP 6. Trinovi Khairani (F-PG) / Anggota BKSAP 7. Melly Goeslaw (F-PGerindra) / Anggota BKSAP 8. Andina Theresia Narang (F-PNasdem) / Anggota BKSAP 9. Fathi (F-PD) / Anggota BKSAP 10. Jazuli Juwaini (F-PKS) / Anggota BKSAP 11. Andi Muawiyah Ramli (F-PKB) / Anggota BKSAP 12. Verrel Bramasta (F-PAN) / Anggota BKSAP <p>Dalam gelaran Sidang ke-150 IPU (Inter Parliamentary Union), di Taskent, Uzbekistan baru-baru ini, BKSAP DPR RI menyerukan isu resolusi damai di Palestina dan Myanmar. BKSAP menegaskan kekerasan dan pembunuhan warga sipil baik di Palestina maupun Myanmar harus segera dihentikan karena bertentangan dengan prinsip hak asasi kemanusiaan. Menurutnya, seharusnya Israel mematuhi kesepakatan gencatan senjata dan junta militer Myanmar fokus pada pemulihan negara pasca gempa. Mardani menyatakan BKSAP DPR RI akan terus menyuarakan dan memperjuangkan perdamaian Palestina dan Myanmar.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Dalam persidangan tersebut BKSAP juga menghadiri <i>Forum of Women Parliamentarians</i> dimana BKSAP menegaskan bahwa keterlibatan perempuan adalah kunci dalam mewujudkan perdamaian dan pembangunan berkelanjutan.</p> <p>Pada sela – sela persidangan tersebut, Delegasi BKSAP DPR RI juga berkesempatan untuk mengadakan pertemuan bilateral dengan beberapa Parlemen negara sahabat yang hadir pada IPU 150.</p>	
3.	KSB - BKSAP	<i>Friendly Talk</i> GKSB Polandia dengan Kelompok Persahabatan Parlemen Polandia - Indonesia dilaksanakan pada 8 April 2025.	<p>Ketua Grup Kerja Sama Antar Parlemen (GKSB) DPR RI - Parlemen Polandia Dave Laksono (F-PGolkar) dan Anggota BKSAP DPR RI Amelia Anggraini (F-Nasdem) menerima Delegasi Kelompok Persahabatan Parlemen Polandia-Indonesia yang diketuai oleh Hon. Mr. Mr. Krzysztof Gadowski di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (8/4/2025).</p> <p>Ketua GKSB menyampaikan antusiasme atas hubungan bilateral Indonesia–Polandia yang terus berkembang positif, khususnya dalam momentum peringatan 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada tahun ini. Lebih jauh, Parlemen Indonesia mendorong peningkatan kerja sama konkret diberbagai sektor strategis, mulai dari perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan, hingga pertahanan dan inovasi teknologi.</p> <p>Indonesia berharap Polandia dapat mendukung penyelesaian IEU-CEPA, sekaligus mempercepat pertukaran kunjungan dan kerja sama pendidikan serta penelitian. Kerja sama kedua parlemen dalam fora internasional seperti IPU dan AIPA, juga menjadi kunci penting sebagai bentuk upaya bersama menghadapi tantangan global saat ini.</p>	
4.	KSB - BKSAP	<i>Friendly Talk</i> BKSAP DPR RI dengan Komisi Perdagangan Parlemen Eropa (INTA)	Pimpinan dan Anggota BKSAP DPR RI menyambut kedatangan Delegasi Komite Perdagangan Luar Negeri (INTA) Parlemen Eropa yang, diketuai	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>dilaksanakan pada 16 April 2025.</p>	<p>oleh Hon. Mr. Bernd Lange, dalam pertemuan yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, siang ini (16/4/2025).</p> <p>Pertemuan ini menjadi wadah penting untuk mempererat kerja sama antar-parlemen, khususnya dalam memperkuat hubungan dagang dan investasi antara Indonesia dan Uni Eropa.</p> <p>Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ravindra Airlangga (F-PG) menekankan pentingnya penyelesaian Indonesia-EU <i>Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> (IEU-CEPA) yang telah berlangsung dalam 19 putaran negosiasi.</p> <p>Kesepakatan ini diharapkan mampu membuka peluang pasar yang lebih luas dan memberikan manfaat ekonomi bagi lebih dari 600 juta penduduk di kedua kawasan. Hadir dalam pertemuan tersebut Anggota BKSAP Melly Goeslaw (F-PGerindra), Amelia Anggraini (F-PNASDEM), Andina Thresia Narang (F-NASDEM), serta Anggota Komisi VI Imas Aan Ubudiah (F-PKB). Dalam pertemuan lanjutan pada periode Parlemen Baru ini, Indonesia juga menyampaikan keprihatinan terkait implementasi EU <i>Deforestation Regulation</i> (EUDR). Indonesia mendorong adanya dialog bilateral untuk menyederhanakan regulasi ini secara adil dan inklusif.</p> <p>Selain isu perdagangan, pertemuan juga membahas kerja sama multisektor seperti pariwisata dan <i>people-to-people relations</i>. Kolaborasi kuat antara parlemen menjadi kunci untuk mewujudkan masa depan yang berkelanjutan dan sejahtera bagi semua.</p>	
5.	KSB - BKSAP	<p>Rapat Internal GKSB Rumania dilaksanakan 17 April 2025.</p>	<p>Ketua GKSB DPR RI – Parlemen Rumania, Ir. H. Sahidin (F-PAN) memimpin Rapat Internal GKSB Rumania guna membahas rencana kunjungan yang akan diadakan pada tanggal 26 April – 2 Mei 2025. Dalam kunjungan tersebut, rencananya akan diadakan pertemuan dengan</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Kelompok Persahabatan Parlemen Rumania – Indonesia, Komisi Luar Negeri Parlemen Rumania serta Komisi Perindustrian Parlemen Rumania.	
6	KSR - BKSAP	Rapat Koordinasi BKSAP DPR RI dengan <i>Westminster Foundation for Democracy (WFD)</i> dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dilaksanakan pada 17 April 2025.	Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera, M.Eng (F-PKS) memimpin Rapat Koordinasi dengan <i>Westminster Foundation for Democracy (WFD)</i> dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) guna membahas tindak lanjut hasil <i>Focus Group Discussion</i> BKSAP DPR RI dengan WFD dan OMS pada tanggal 20 Maret 2025 dengan tema “ <i>Fostering Transparency, Participation, and Accountability through Open Parliament in Indonesia</i> ”. Pertemuan dihadiri 20 (dua puluh) organisasi masyarakat sipil dan <i>Chief of Country and Local Program Open Government Partnership (OGP)</i> , Shreya Basu.	
7	KSB - BKSAP	Kunjungan Diplomasi BKSAP ke Malaysia dilaksanakan pada 11 – 17 Maret 2025	Delegasi BKSAP DPR RI yang dipimpin oleh Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS) mengadakan kunjungan diplomasi ke Malaysia pada tanggal 11-17 Maret 2025. Delegasi terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Irine Roba (F-PDIP), Wakil Ketua BKSAP. 2. Ravindra Airlangga (F-PG), Wakil Ketua BKSAP. 3. M. Husein Fadlulloh (F-PGerindra), Wakil Ketua BKSAP. 4. Bramantyo Suwondo (F-PD), Wakil Ketua BKSAP. <p>Dalam kunjungan tersebut, delegasi mengadakan pertemuan dengan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KBRI Singapura. 2. Kementerian Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup dan Badan Utilitas Publik Singapura. 3. Temasek. 4. Singapore – <i>Southeast Asia Parliamentary Friendship Group</i>. 	

LAPORAN DWI MINGGUAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	DPRD Kota Bandar Lampung	Rapat Audensi dilaksanakan pada hari Senin, 14 April 2025.	Dalam rangka masukan terkait Penerapan Kewenangan Badan Kehormatan untuk meningkatkan efektivitas terlaksananya tata tertib khususnya tingkat kehadiran dan pemberhentian dewan.	
